
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WORK FROM HOME (WFH) DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS

¹Oti Kusumaningsih, ²Ranjani, ³Sartono, ⁴Aditya Garik Waskita Nugraha

^{1,2,3,4}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Email: ¹oti.kusumaningsih.msi@gmail.com, ²ranjanirara98@gmail.com, ³sartonofisip@gmail.com, ⁴adityagarikwaskita@gmail.com

ABSTRACT

Policy implementation plays an important role in determining the success of a public policy. Policy implementation has various impacts and conditions. This study aims to analyze and describe the implementation of work from home (WFH) policies at the Communication and Information Office of Banyumas Regency. The method used in this research is qualitative method. The results of this study indicate that the implementation of the Work From Home Policy at the Communication and Information Office of Banyumas Regency has been able to fulfill spatial aspects well, namely in the form of transforming personal space or employee homes in the Communication and Information Office of Banyumas Regency by maximizing various existing devices and technologies that are considered convenient to use. In terms of time, the employees of the Banyumas Regency Communication and Information Office have been able to adapt to two different time situations, namely cyclical time and linear time. This proves that the support from the office and family is able to fulfill the time aspect well. Meanwhile, in the aspect of social roles, the Banyumas Regency Communication and Information Office has been able to provide good work productivity by aligning the roles of personal narratives as employees, husbands or wives and as parents.

Keywords: *Implementation, Policy, Work From Home.*

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak tahun 2019 menimbulkan berbagai dampak dan perubahan terhadap berbagai aspek kelangsungan hidup masyarakat. Perubahan merupakan suatu langkah perpindahan masalah dari keadaan saat ini menuju keadaan di masa yang akan datang (George dan Jones, 2012). Sebagian besar negara mengalami berbagai persoalan serius akibat Pandemi Covid-19, salah satu diantaranya menjadikan pergerakan ekonomi terhambat dan mengalami krisis (Ahmad et al, 2020). Dampak langsung yang tercatat yakni sebanyak 195 juta pekerjaan penuh waktu atau sebanyak 6,7 persen jam kerja secara global akan hilang. Banyak orang dipekerjakan dengan upah rendah, keterampilan rendah dan kehilangan pekerjaan akan menjadi suatu bencana (*International Labour Organization*, 2020). Tingginya tingkat pengangguran dipastikan akan mempengaruhi penurunan pertumbuhan ekonomi (Sihaloho, 2020).

Indonesia menjadi salah satu negara di Dunia yang terwabah pandemi Covid-19. Penyebaran Covid-19 yang semakin meluas di Indonesia, menuntut jajaran pemerintah pusat maupun daerah untuk melaksanakan upaya-upaya preventif demi memutus rantai penularan virus Covid-19 melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19). Kebijakan tersebut diterapkan melalui *physical distancing* atau himbauan untuk menjaga jarak aman diantaranya masyarakat, meminimalisir interaksi dengan kerumunan dan segala bentuk kerumunan, perkumpulan, serta mengantisipasi pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang (Iksanudin, 2020). Implementasi kebijakan tersebut dijadikan sebagai alternative pemecahan masalah yang dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek kesehatan, birokrasi, politik maupun keuangan Negara Indonesia yang diakibatkan dari pandemic covid-19 (Widianingrum & Mas'uid, 2020).

Pandemi Covid-19 memaksa masyarakat untuk adaptif dalam menghadapi berbagai dampak yang ditimbulkan demi kelancaran aktivitas masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang masih mewabah di Dunia. Salah satu langkah konkrit yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan melaksanakan perubahan sistem kerja yaitu dengan menerapkan bekerja dari rumah atau yang dikenal dengan *Work From Home* (WFH). Covid-19 sangat berdampak terhadap sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Hal tersebut selaras dengan keterangan yang disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, bahwa akibat dari pandemic Covid-19 mengharuskan 17.224 dari 873.090 perusahaan sektor formal menerapkan *work from home* (WFH) mulai tanggal 7 April 2020 (Jawahir, 2020).

Work From Home (WFH) merupakan suatu konsep kerja baru, yaitu bekerja dari rumah. Kegiatan tersebut merupakan upaya perusahaan atau instansi terkait untuk menjaga keamanan dan kesehatan karyawannya ditengah wabah pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih menyerang Indonesia serta bentuk kepatuhan instansi dan perusahaan atas kebijakan pemerintah untuk bekerja dari rumah (Rakha, 2021). Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberlakukan kebijakan *work from home* bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui kebijakannya yang dituangkan dalam Surat Edaran Menpan-RB Nomor 23 Tahun 2021 mengenai Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai

Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu Kabupaten yang menerapkan kebijakan *work from home* yang diatur dalam Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 800/1460/2022 tentang Perpanjangan Ketiga Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat level 3 pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 pada masa pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Banyumas. Surat edaran tersebut menetapkan:

1. Pemberlakuan sektor esensial dan non esensial maksimal 50% (lima puluh persen) staf *work from office* dengan protokol kesehatan secara ketat;
2. Pemberlakuan sektor kritikal maksimal 100% (seratus persen) *work from office* dengan protokol kesehatan secara ketat;
3. Aparatur Sipil Negara dengan penyakit bawaan atau komorbid diperkenankan untuk WFH sesuai dengan kondisi kesehatannya, hal tersebut diatur oleh Kepala Perangkat Daerah dan untuk JPT Pratama ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
4. Anggota ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang akan melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terlebih dengan izin dari Wakil Bupati Banyumas (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, 2022).

Berdasarkan uraian dari ketetapan surat edaran tersebut, salah satu Organisasi Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Banyumas yang menerapkan WFH adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sebagai dinas esensial yang menerapkan kebijakan 50% (lima puluh persen) berdasarkan Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 800/1460/2022 (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, 2022).

Salah satu tugas pokok dan fungsi Kominfo Kabupaten Banyumas berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat adalah pengelolaan *e-government* di wilayah pemerintah daerah, misalnya dalam pemberian pelayanan lapak aduan bagi masyarakat Kabupaten Banyumas. Lapak aduan tersebut difasilitasi melalui berbagai jejaring media social, seperti whatsapp, instagram, twitter, facebook maupun

email yang nantinya akan secara langsung terhubung dengan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kabupaten Banyumas (jatengprov.go.id, diakses pada 24 Juni 2022).

Mekanisme kerja lapak aduan adalah dengan menghubungkan langsung aduan yang disampaikan oleh masyarakat dengan PIC (*Person in Charge*) dari masing-masing OPD. Kebijakan WFH diketahui berdampak pada kinerja lapak aduan Kabupaten Banyumas. Karena dengan diberlakukannya WFH, diketahui banyak masyarakat yang mengeluhkan keterlambatan respon dari OPD terkait keluhan, kritik, dan saran yang diberikan. Salah satu alasan yang melatarbelakangi keterlambatan OPD dalam merespon keluhan masyarakat adalah kendala koordinasi yang dialami oleh PIC, karena setiap aduan, kritik dan saran dari masyarakat harus dikomunikasikan secara berjenjang sesuai dengan alur koordinasinya (purwokerto.inews.id, 2022). Keterlambatan respon tersebut juga diindikasikan sebagai bentuk keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Kemudian, permasalahan lain yang dihadapi oleh Kominfo Kabupaten Banyumas selama WFH adalah kesulitan dalam mengakses data tempat tinggal pegawai, absensi pegawai menjadi berantakan, pengawasan kinerja pegawai.

Mengingat pentingnya peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas di masa pandemi Covid-19, maka menarik untuk dikaji secara lebih mendalam Implementasi Kebijakan *Work From Home* (WFH) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. Sebagai pisau analisis untuk mengetahui permasalahan penelitian, peneliti menggunakan dua pendekatan implementasi kebijakan public menurut Ripley, yaitu *Compliance* dan *Whats's happening*. Untuk mendalami analisis tersebut, digunakan 3 (tiga) aspek *work from home* menurut Gadecki (2018), yaitu aspek ruang, waktu dan peran sosial.

B. METODE

Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan *Work From Home* (WFH) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk studi kasus terpancang atau *embaded case study* (Yin, 2012). Lokasi penelitian ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, dengan informan

penelitian : (a) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, (b) Jabatan Fungsional Subdirektorat, (c) Pranata Komputer. Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *Purposive Sampling*.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, terdiri dari 3 (tiga) metode, diantaranya adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang disesuaikan dengan sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu : (a) informan, (b) tempat dan peristiwa, dan (c) dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (Miles dan Huberman, 1984). Sementara dalam rangka mewujudkan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 4 (empat) kriteria keabsahan data, diantaranya : (a) derajat kepercayaan, (b) transferabilitas data, (c) dependabilitas data, dan (d) konfirmabilitas data (Moleong, 1990).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia, baik kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya. Hal tersebut berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah terdampak Covid-19 (Chaplyuk et al, 2021; McKibbin & Fernando, 2020). Penurunan tersebut berdampak pada berbagai aspek terutama peningkatan jumlah pengangguran (Coibon et al, 2021). Covid-19 mempengaruhi berbagai sektor terutama sektor ketenagakerjaan. Hal mendasar yang menjadi bagian penting dari upaya penanganan dampak pandemi Covid-19 adalah kondisi ketenagakerjaan di Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, bahwa pandemic Covid-19 mengakibatkan 17.224 dari 873.090 perusahaan sektor formal menerapkan *work from home* (WFH) mulai tanggal 7 April 2020 (Jawahir, 2020).

Work From Home dimaknai sebagai suatu kegiatan bekerja jarak jauh atau bekerja dari rumah. Berdasarkan konsep tersebut, para pekerja tidak diwajibkan untuk datang ke kantor secara langsung. Crosbie & Moore (2004) menyampaikan bahwa, bekerja dari rumah dimaknai sebagai suatu pekerjaan berbayar yang dilakukan dari rumah dengan ketentuan minimal dilaksanakan 20 jam dalam satu minggu. Konsep kerja tersebut memberikan waktu yang fleksibel bagi para pekerja untuk dapat mengatur keseimbangan hidup karyawan tetapi tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Mungkasa (2020) menyampaikan bahwa mekanisme *Work From Home*

(WFH) adalah bagian dari konsep bekerja jarak jauh (*telecommuting*) yang sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sudah dikenal sejak tahun 1970an sebagai suatu solusi dalam mengatasi kemacetan lalu lintas dari perjalanan rumah ke kantor pulang pergi setiap hari.

Kebijakan WFH disusun melalui proses diskusi berkelanjutan yang dimulai dengan ekspresi kepentingan umum dan berakhir pada keputusan konkret (Majone, 2006). Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Banyumas yang menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan *Work From Home* adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas atau lebih familiar disebut Kominfo Banyumas.

Kominfo Banyumas memiliki berwenang atas penyelenggara urusan pemerintah yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika di wilayah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kominfo Kabupaten Banyumas juga memiliki kuasa untuk melaksanakan tugas perizinan, diantaranya adalah izin penyelenggaraan system elektronik, izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penyelenggaraan penyiaran (Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan), Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi hingga Izin Stasiun Radio (Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022).

Tugas pokok lain yang dimiliki oleh Kominfo Kabupaten Banyumas adalah merumuskan layanan dan website yang diizinkan untuk beroperasi, sementara bagi website yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang diberikan sanksi tegas berupa pemblokiran website. Kominfo Kabupaten Banyumas berperan juga dalam memberikan pembinaan dalam bidang komunikasi dan informatika melalui program *digitalent* (Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022). Proses penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan wewenang dan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sesuai dengan gagasan yang disampaikan Laswell (1956), bahwa demi mendapatkan pengetahuan yang cukup baik mengenai kondisi yang sebenarnya dalam kebijakan public, kemudian diurai menjadi beberapa tahapan-tahapan kebijakan, diantaranya yaitu : *agenda setting*, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi dan terminasi. Berdasarkan tahapan kebijakan tersebut, secara tegas diketahui bahwa implementasi kebijakan hanya sebatas

bagian atau salah satu tahapan dari rangkaian proses yang meliputi bagaimana suatu kebijakan publik dirumuskan.

Implementasi kebijakan *work from home* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas masih menuai berbagai kendala, sehingga dalam penelitian ini permasalahan tersebut dianalisis secara lebih mendalam menggunakan dua pendekatan dalam implementasi kebijakan public menurut Ripley, yaitu *Compliance* dan *Whats's happening*. Sesuai dengan permasalahan penelitian, secara lebih spesifik untuk mendalami analisis mengenai implementasi kebijakan WFH di Kominfo Kabupaten Banyumas digunakan 3 (tiga) aspek *work from home* menurut Gadecki (2018), yaitu aspek ruang, waktu dan peran sosial.

1. Aspek Ruang

Ruang adalah suatu pergeseran fungsi dari ruang pribadi rumah (sebagai tempat realisasi kesukaan dan mengekspresikan diri) ke dalam "*quasi-public space*" (ruang publik semu). Ruang publik semu dimaknai sebagai suatu ruang yang dimiliki secara privat oleh perorangan yang pada umumnya berbentuk ruang terbuka privat seperti halaman rumah, ruang makan dan ruang di dalam rumah (Carmona, 2008). Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas tidak memiliki ruang privat yang dikhususkan sebagai tempat pelaksanaan *Work From Home*, karena pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas mayoritas melaksanakan WFH di rumahnya masing-masing, berdampingan dengan berbagai kegiatan anggota keluarga lainnya. Namun demikian, keterbatasan tersebut diketahui tidak menghambat pegawai dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.

Tanggung jawab dan tugas yang dilakukan di rumah perlu dipahami secara lebih mendalam, termasuk dalam praktiknya, misalnya bahwa bekerja di rumah mengakibatkan pekerja harus menghadapi dua dunia yaitu privat dan publik atau antara keluarga dan pekerjaan secara bersamaan dengan keterbatasan ruang yang ada. Hal tersebut senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa pekerja yang tinggal di rumah mengalami berbagai ketegangan berkaitan dengan interpenetrasi ruang pribadi dan publik dalam satu atap. Temuan penelitian tersebut selaras dengan gagasan Gadecki (2018) yang menyatakan bahwa *Work From Home* atau *telecommuting* adalah proses yang diarahkan untuk membedakan dan

menyesuaikan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang dilakukan secara terus menerus.

Dukungan yang diberikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika kepada pegawai sebagai sarana pelaksanaan *work from home* adalah dengan memfasilitasi perangkat keras berupa laptop sebagai media untuk melaksanakan komunikasi digital. Sementara untuk jaringan internet tidak difasilitasi secara khusus dengan alasan keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chrysanthaki (2013) yang menyatakan bahwa dalam keterbatasan keberhasilan atas suatu implementasi kebijakan terdapat berbagai faktor politik yang melatarbelakangi kegagalan tersebut, diantaranya adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki.

Hasil penelitian lainnya pada aspek ruang, menunjukkan bahwa pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas mampu menggunakan teknologi dan menyesuaikan diri antara kehidupannya sebagai pegawai dan kehidupan pribadinya di rumah. Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas dalam menyelesaikan tugasnya selama sistem kerja *Work From Home* mampu menggunakan berbagai jenis perangkat yang dibutuhkan sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugasnya, seperti perangkat keras dan perangkat lunak yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada aspek ruang, implementasi kebijakan *Work From Home* sudah terpenuhi, yaitu berupa ketersediaan ruang privat yang dapat digunakan sebagai ruang publik semu yang difungsikan untuk pelaksanaan tugas selama kegiatan *Work From Home* (Gadecki, 2018).

Transformasi ruang pribadi rumah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas mampu memenuhi aspek ruang dengan baik yaitu dengan menggunakan ruangan di rumah yang dianggap nyaman untuk bekerja dengan memanfaatkan perangkat dan teknologi yang ada. Temuan tersebut selaras dengan konsep Implementasi kebijakan yang digunakan sebagai “penghubung” karena melalui tahapan ini dilakukan *delivery mechanism*, yaitu saat berbagai *policy output* yang dikonfersi dan *policy input* disampaikan kepada kelompok sasaran sebagai upaya konkrit untuk mencapai tujuan kebijakan. Hal senada dikatakan oleh Grindle (1980) bahwa “*in involves, therefore, the creation of policy delivery system, in which*

specific means redesigned and pursued in the expectation of arriving at particular end”.

2. Aspek Waktu

Aspek waktu dimaknai sebagai suatu penggunaan ruang pribadi oleh ruang kerja yang berfokus kepada benturan dua hal berbeda, yaitu sistem waktu siklik yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga dan sistem waktu linear yang berkaitan dengan tugas profesional dimana keduanya *overlapping* (Gadecki, 2018). Kominfo Kabupaten Banyumas menyusun penjadwalan WFH dengan mengacu pada Surat Edaran Bupati Banyumas Nomor 800/1460/2022 mengenai Perpanjangan Ketiga Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada masa PPKM Level 3 (tiga) di Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pada level 3 (tiga) PPK Kabupaten Banyumas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sebagai sector esensial memberlakukan jadwal sebesar 50% WFO. Pembagian jadwal WFH disesuaikan dengan level PPKM secara proporsional dan kebutuhan tugas pekerjaan dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari bidang. Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas menerima jadwal WFH yang sudah ditentukan karena sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memahami situasi dan kondisi yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sebagai “*ringing labour*” telah mengikuti jadwal *Work From Home* sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Surat Edaran Bupati Banyumas, meskipun dalam implementasinya masih terjadi tabrakan dua waktu yang berbeda, yaitu waktu siklik dan waktu linear yang berdampak pada timbulnya berbagai ritme kerja yang kurang selaras dan menimbulkan tumpang tindih satu sama lain. Meski demikian, kendala tersebut teratasi dengan baik karena pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas telah memahami tupoksi masing-masing, sehingga tugas dan tanggung jawab yang dimiliki dikerjakan sesuai dengan kewenangannya tanpa terpaku dengan jadwal *Work From Home*. Pemahaman atas tupoksi tersebut didasarkan pada kemampuan pegawai untuk melakukan pekerjaannya dengan benar dan unggul dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian dan sikap (Emron, 2017).

Koordinasi yang dilakukan oleh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas ialah melalui aplikasi *whatsapp*. Koordinasi tersebut secara umum berjalan dengan lancar. Penggunaan media digital telah memperluas kebebasan memilih, meningkatkan interaksi, dan membuka peluang partisipasi masyarakat sipil di ranah publik (Aelst, 2017). Penggunaan media digital *whatsapp* merupakan sarana komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. Komunikasi merupakan salah satu faktor penyebab kegagalan implementasi kebijakan publik (Borrelli, 2018; Hudson, et al, 2019).

Sementara dalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan dilakukan melalui *zoom meeting*. Pengawasan dimaknai sebagai suatu proses ketika pimpinan mengidentifikasi hasil pelaksanaan pekerjaan karyawan apakah sudah sesuai rencana, perintah, kebijakan serta tujuan yang telah ditetapkan (Manullang, 2005). Proses pengawasan tersebut berjalan kurang maksimal dikarenakan berbagai keterbatasan yang dialami sebagai akibat dari implementasi kebijakan *work from home*. Kendala utama dalam implementasi kebijakan tersebut adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.

Temuan lain pada aspek waktu menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas masih mengalami berbagai kendala terkait dengan pembagian jadwal *Work From Home*. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan situasi yang signifikan dan tiba-tiba sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang mewabah di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui bahwa kebijakan WFH di Kominfo Kabupaten Banyumas melalui berbagai tahapan kebijakan yang berada diantaranya adalah penyusunan dan dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari kebijakan tersebut (Edwards III, 1980).

3. Peran Sosial

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan aspek peran sosial menunjukkan bahwa pegawai Kominfo Kabupaten Banyumas mengalami berbagai ketegangan berkaitan dengan interpenetrasi ruang pribadi dan ruang publik yang berlokasi pada satu atap yang sama. Menyelesaikan pekerjaan dan peran sebagai anggota keluarga secara bersamaan, memicu konflik dalam peran ganda yang dialami oleh pegawai (Sheikh et al., 2018). Aspek peran sosial adalah deskripsi mengenai pribadi pekerja dari rumah dan posisi *teleworker* yang dilakukan secara

bersamaan (Gedecki, 2018). *Telework* tersebut kemudian menjadi sebuah kontinuitas untuk terus menerus bekerja demi membangun dan menegosiasikan batasan diantara kegiatan luar dan dalam rumah sebagai konsekuensi dari implementasi kebijakan *Work From Home* (Gadecki, 2018).

Tugas dan fungsi masing-masing struktur yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas diatur melalui Peraturan Bupati Banyumas Nomor 95 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama WFH masih dapat dikondisikan dengan baik meskipun banyak terjadi halangan dan kendala. Terjadi perubahan struktur organisasi dari structural eselon IV (empat) menjadi Sub Koordinator sehingga terjadi perubahan pola pekerjaan. Sementara bagi pejabat fungsional tidak terjadi masalah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi karena masih mampu untuk mengumpulkan angka kredit sebagai dasar dalam kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat.

Kebijakan *Work From Home* menimbulkan berbagai perubahan, sebagai akibat dari pergeseran sistem kerja dari kantor menjadi dari rumah. Namun demikian, hal tersebut tidak menjadi kendala besar bagi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. Informasi yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian menunjukkan terjadi perubahan peran masing-masing pegawai dimana seorang pejabat di kantor menjadi seorang suami atau istri dan orang tua dari anak-anak di keluarganya. Perubahan peran pegawai bukan merubah secara keseluruhan namun lebih kepada mendampingkan peran antara seorang pegawai dengan suami atau istri dan sebagai orangtua di keluarganya. *Work From Home* tidak memberikan persepsi harus mengubah peran di kantor dan di rumah karena saat WFH sebagai pegawai mampu menyesuaikan diri dan keluarga mendukung tugas pekerjaan yang dilaksanakan selama WFH meskipun pegawai harus membagi konsentrasi antara pekerjaan dengan peran di rumah. Perubahan tersebut dipahami oleh pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika dengan membagi peran sebagai individu dan anggota keluarga secara bersamaan. Temuan tersebut selaras dengan pendapat Bloom (2015) yang menyatakan bahwa memiliki karyawan yang bekerja dari rumah mengakibatkan dua masalah utama. Pertama, berkaitan dengan manfaat atas peningkatan produktivitas dan profitabilitas. Berikutnya, berkaitan dengan

kekhawatiran tentang penurunan keseimbangan kehidupan kerja (*worklife balance*) dan peran WFH sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Pada dasarnya pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sudah mengerti tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan sudah terbiasa dalam penggunaan perangkat komunikasi pertemuan virtual. Sementara pelatihan, seminar dan rapat dilaksanakan secara virtual dan berdampak positif terhadap perkembangan pegawai. Diklat atau pelatihan tidak mengganggu jalannya *work from home* karena dilaksanakan secara virtual.

Berdasarkan uraian analisis hasil penelitian di atas, implementasi kebijakan *work from home* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas jika dikaitkan dengan 2 (dua) pendekatan implementasi kebijakan public menurut Ripley dan Franklin (1986) yaitu *compliance* dan *what's happening*. Pendekatan pertama yaitu kepatuhan yang melihat bagaimana implementor mematuhi prosedur yang sudah ditetapkan, dengan batasan dan jadwal yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian pendekatan kedua berkaitan dengan proses pelaksanaan kebijakan tersebut dan apa yang berhasil dicapai atas pelaksanaan tersebut. Uraian mengenai bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas mengimplementasikan kebijakan *work from home* menunjukkan aspek *compliance*. Kepatuhan Dinas Komunikasi dan Informatika dinilai melalui kesesuaian kebijakan *work from home* dengan Surat Edaran Bupati Banyumas yang mengatur mengenai kebijakan tersebut. Sementara berdasarkan aspek *what's happening* dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan *work from home* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas. Kominfo Kabupaten Banyumas tampak telah memenuhi aspek-aspek *work from home* menurut Gadecki (2018) yaitu aspek ruang, waktu dan peran social.

D. SIMPULAN

Bertitik tolak dari hasil penelitian yang telah peneliti uraikan sebeumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Implementasi Kebijakan *Work From Home* di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas sudah mampu memenuhi aspek ruang dengan baik, yaitu berupa transformasi ruang pribadi rumah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas dengan

memaksimalkan berbagai perangkat dan teknologi yang ada dianggap nyaman untuk bekerja.

2. Pada aspek waktu, pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas mampu menyesuaikan diri dengan dua situasi waktu yang berbeda, yaitu waktu siklik dan waktu linear. Hal tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi dukungan dinas dan keluarga mampu memenuhi aspek waktu dengan baik.
3. Sementara pada aspek peran sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas mampu memberikan produktivitas kerja yang baik dengan menyelaraskan peran narasi pribadi sebagai seorang pegawai, dan sebagai seorang suami atau istri dan sebagai orang tua.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti merekomendasikan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas perlu memfasilitasi pegawai untuk menyediakan ruang privat yang dapat digunakan sebagai ruang publik semu, misalnya dengan memfasilitasi jaringan internet dan perangkat penunjang lain. Sementara rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dilihat dari berbagai kelemahan dari penelitian ini, diantaranya dari segi lokasi penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan di dua lokasi yang berbeda, untuk kemudian dapat dibandingkan keberhasilan dan kegagalan dari masing-masing lokasi penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aelst, Peter et al. 2017. Political Communication in a High-choice Media Environment: a Challenge for Democracy ANNALS,, Vol. 41 No. 1. Routledge.
- Ahmad, T., Haroon, M.B., & Hui, J. 2020. *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and Economic Impact*. Pakistan Journal of Medical Sciences. 36(COVID-19-S4), S73.
- Borrelli, L. M. 2018. Whisper down, up and between the lanes : Exclusionary policies and their limits of control in times of irregularized migration. *Public Administration*, 96, 803-816.
- Chaplyuk, V. Z, R.M. K., Abueva, M.M.S., Hossain, M.N., & Humssi, A.S.AI. 2021. *COVID-19 and its impacts on Global Economic Spheres*. Modern Global

- Economic System : Evolutional Development vs Revolutionary Leap. 198, 824-833.
- Chrysanthaki, T., Hendy, j., & Barlow, J. 2013. Stimulating Whole System Redesign: Lesson from an Organizational Analysis of The Whole System Demonstrator Programme. *Journal of Health Services and Policy*. 18, 47-55.
- Coibion, O., Garodnihenko, Y., & Weber, M. 2020. *Labor Markets During The Covid-19 Crisis: A Preliminary View*. In NBER Working Paper 27/017.
- Gadecki, et al. 2018. *New Technologies and Familiy, Life in The Context of Work At Home. The strategies Of Work-Life Balance*. Studia Humanistyczne AGH. 17.4
- George, J.M (N.D). *Feeling Good-Doing Good : A Conceptual Of The Mood At Work-Organizational Spontaneity Relationship*. 20.
- Hudson, B. Hunter, D. & Peckham, S. 2019. Policy Failure ang the policy implementation gap : can policy support programs help?. *Policy Design and Practice*. 2 (1): 1-14.
- International Labour Organization. 2020. COVID-19 and The World of Work, Impact and Policy Responses, ILO.
- Jawahir, Gustav Rizal. 2021. *Pandemic Covid-19: Apa Saja Dampak Pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia?*.
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/Pandemi-Covid19-apa-sajadampakpada-sektorketenagakerjaan-Indonesia?Page=All>
- Kementerian Ketengakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker). 2020.
<https://finance.detik.com/beritaekonomibisnis/d-4982393/duh-nyaris-2-juta-pekerja-dirumahan-dan-kena-phk-gegara-corona>.
- Majone, Giandomenico. 2006. Agenda Setting dalam The Oxford Hanbook of Public Policy. Vol. 3 hal 228-250. UK: Oxford University.
- Mas'udi, Wawan & Poppy S. Winanti. 2020. Covid 19 : Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM : UGM Press
- Miles, Matther B, Huberman dan Saldana. 1984. *Qualitative data Analysis : A Methods Book*. Thousands oaks, CA : Sage Publication.
- Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

- Mungkasa, O. 2020. Bekerja dari Rumah (*Working From Home/WFH*): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19. *Jurnal Perencanaan Pembangunan : The Indonesian Journal of Development Planning*. 4 (2), 126-150.
- Rakha, Fahreza. 2021. Wfh Artinya Konsep Pekerjaan yang Dikerjakan Dari Rumah Ketahui Untung Ruginya. 20 Juli. <https://www.merdeka.com/jatim/wfh-artinya-konsep-pekerjaan-yang-dikerjakan-dari-rumah-ketahui-untung-ruginya-Kln.Html>
- Setiati, S & Azwar, M.K. 2020. *Dilemma of Prioritising Health and The Economy During COVID-19 Pandemic in Indonesia*. *ActaMed-Indonesia*. *Indonesia Intern Med*, 52(3), 196-198.
- Widianingrum, Ambar & Wawan Mas'uid. 2020. *Dinamika Respon Pemerintah Nasional: Krisis Kebijakan Penanganan Covid-19*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM: UGM Press
- Yin, Robert K. 2012. *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta : Raja Grafindo.